

Volume 1, Nomor 1,
Juni 2024

Authors

¹ **K. Zulfan Andriansyah***

² **Sutrisno Hadi**

Affiliation

¹ Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan*

² Universitas Islam Negeri Raden
Fatah Palembang

Email

Correspondent Author*

kzazulfan@gmail.com

**Konsep Sistem Pemerintahan dan
Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an**

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tiga konsep pemerintahan dan demokrasi yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Islam, yaitu syura, ummah dan bai'at. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan, karena sumber literatur diperoleh dari majalah, laporan penelitian, informasi dari media cetak, web dan sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran mengenai Konsep Sistem Pemerintahan dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an. Berdasarkan hasil penelitian, didapati kesimpulan bahwa konsep syura mendorong pemerintahan yang partisipatif yaitu pengambilan keputusan tidak hanya ditentukan oleh pemimpin atau pemerintah, tetapi juga melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk ulama, pemimpin masyarakat, dan warga negara. Konsep Syura juga mendorong proses pengambilan keputusan yang adil dan transparan tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan serta untuk memastikan akuntabilitas pemerintah. Adapun konsep ummah memiliki dampak besar dalam kehidupan sosial umat Islam serta dapat diimplementasikan secara universal melalui nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Konsep ummah juga menekankan persatuan dan solidaritas antara umat manusia. Sedangkan konsep bai'at dalam konteks berbangsa dan bernegara merujuk pada tindakan kesetiaan, pengakuan, dan komitmen yang diambil oleh warga negara terhadap pemerintahan atau pemimpin mereka. Konsep ini memiliki variasi dalam berbagai negara dan budaya, tergantung pada sistem politik dan nilai-nilai yang berlaku. Bai'at juga mencerminkan komitmen individu atau kelompok terhadap prinsip-prinsip negara atau konstitusi yang berlaku. Konsep Bai'at menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah atau pemimpin berkomitmen untuk melindungi dan melayani warga negara, sementara warga negara berkomitmen untuk mendukung pemerintah dan mematuhi hukum.

Kata Kunci

Syura, Ummah, Baiat

Pendahuluan

Kata demokrasi sudah tidak asing lagi karena demokrasi merupakan suatu sistem yang dijadikan sebagai alternatif dalam pembangunan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demokrasi mengacu pada sistem pemerintahan nasional yang berupaya meningkatkan kedaulatan, kekuasaan warga negara, atas pemerintah (Afifa, 2018). Demokrasi secara teori

berarti ketika pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan menganut paham demokrasi, maka 1) pemerintah harus rela menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat; 2) Rakyat membentuk pemerintahan; 3) Orang yang memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan tindakan pemerintah. Hakikat demokrasi dalam suatu sistem pemerintahan mengandung makna bahwa rakyat mempunyai kekuasaan baik di dalam maupun di luar pemerintahan., yang mencakup tiga hal yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Pokja, 2005).

Adapun sistem pemerintahan dan demokrasi Islam mengacu pada upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam. Ini melibatkan pemahaman dan implementasi konsep-konsep demokrasi dalam konteks nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan kepemimpinan yang adil. Namun, perlu diingat bahwa interpretasi dan implementasi demokrasi Islam dapat berbeda di berbagai negara dan kelompok. Sistem pemerintahan Islam umumnya menekankan pentingnya penerapan hukum Islam atau syariah. Namun, cara implementasinya bisa bervariasi, mulai dari negara-negara dengan hukum Islam yang ketat hingga negara-negara yang menggabungkan unsur-unsur hukum Islam dengan hukum positif modern. Setidaknya ada 3 konsep sistem pemerintahan dan demokrasi yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi muslim, yaitu syura, ummah, dan baiat.

Dilihat dari sudut pandang etimologis, syura memiliki dua arti: 'mengungkapkan, menjelaskan atau menghilangkan sesuatu'. Saat ini, dari sudut pandang tekstual, terdapat banyak definisi tentang Syura. Menurut al-Raghib al Aṣḥfahani, syura "adalah metode ekspresi melalui pertukaran timbal balik di antara para peserta syura. Kebanyakan fuqahā menganggap syura "suatu metode penafsiran, atau pendapat para ilmuwan dan pemikir tentang suatu hal" Sementara itu, Ibn al-'Arabi al Maliki memberikan definisi syura: "bertemu untuk meminta". Menurut sebagian ulama fiqih modern, syura dapat diartikan sebagai "proses pemeriksaan pendapat para ulama terhadap suatu permasalahan guna sampai pada penyelesaian yang mendekati kebenaran" (Kasman, 2018) Dilihat dari berbagai definisinya, syura dapat diartikan sebagai "cara mengungkapkan pendapat yang berbeda mengenai suatu peristiwa atau permasalahan, serta mengenai pokok-pokok perselisihan, melalui pemeriksaan para ahli yang mengetahui dan memahami penyelesaian yang tepat dan terbaik."

Agama Islam didasarkan pada rasionalitas, kemanusiaan dan logika. Sumber dan dasar tersebut berasal dari *nuṣūṣ al-syara'*, yang berarti Al-Qur'an dan Sunnah. Secara umum, syura menjadi bagian inti perdebatan ini, sebagai landasan hukum Islam. Salah satu urgensi dan faidah konsep syura untuk diterapkan adalah karena musyawarah perlu diadakan karena bisa saja terlintas dalam benak seseorang pendapat yang mengandung kemaslahatan dan tidak pernah terpikir oleh *Ulil Amri*. Beberapa dalil dalam Al-Qur'an yang menjadi landasan konsep syura diantaranya adalah Q.S. Ali Imran ayat 159 dan Q.S. Asy-Syura ayat 38.

Selain konsep Syura, konsep Ummah merupakan konsep lain dari sistem pemerintahan Islam. Berdasarkan sumber pembelajaran masyarakat sipil dalam gerakan sosial politik Islam, ada dua istilah pokok yaitu ummah dan madinah. Kedua kata pokok ini mempunyai sifat yang sama, yaitu mempunyai nilai dasar dan berguna untuk membangun masyarakat yang manusiawi. Kata ummah jika digabungkan dengan ciri dan ciri tertentu seperti ummat Islam, ummah wasathan, ummah wahidah, khaira ummah, dan lain-lain, merupakan gerakan sosial

utama yang didirikan Nabi Muhammad Saw setelah turunnya beliau ke Madinah. Sistem sosial yang dibangun Nabi adalah sejumlah besar masyarakat yang saling menghargai satu sama lain (Din, 2002). Ummah didefinisikan sebagai komunitas keagamaan, atau komunitas (masyarakat) yang berbagi keyakinan keagamaan. Ummah umumnya mengacu pada komunitas yang dipersatukan oleh prinsip-prinsip agama, etnis atau moral. Menurut M. Quraish Shihab, "Masyarakat adalah kumpulan dari banyak orang, besar maupun kecil, yang hidup bersama menurut norma, aturan, adat istiadat atau hukum tertentu." Di sisi lain, Al-Quran menggambarkan komunitas dan kelompok orang dengan *qaum*, *ummah*, *syu'ub*, *qaba'il*, dan sebagainya (Shihab, 1996).

Selain konsep *syura* dan *ummah*, konsep yang menjadi landasan dalam sistem pemerintah Islam adalah *bai'at*. Kata *bai'at* dimaknai sebagai sebuah kesepakatan atas kewajiban dengan apa yang *dibai'at* dan ketaatan padanya. Namun dalam *munjid* disebutkan bahwa *bai'at* berarti menjadi pemimpin dan melakukan ikatan terhadapnya (Samsul, 2019). Baiat juga dapat diterjemahkan sebagai pembelian. Baiat adalah kata yang dibuat-buat yang berarti "perjanjian", "janji kesetiaan" atau "janji dan kesetiaan". Karena pelaksanaannya merupakan peran serta kedua belah pihak. Bai'at juga dapat diterjemahkan sebagai "penerimaan, sumpah, peneguhan, janji, penobatan" dan "berjabat tangan untuk mengadakan suatu penjualan atau kontrak hak dan kewajiban, kesetiaan dan ketaatan." Menurut maknanya, kata *buyat* konon pada mulanya adalah "perjanjian jual beli antara dua pihak". Secara umum Baiat adalah kesepakatan antara para pemuka agama Islam untuk mendirikan pemerintahan Islam menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dapat disimpulkan bahwa "Baiat merupakan wujud sempurna kecintaan masyarakat terhadap sistem politik Islam yang berkuasa saat ini, dan merupakan pendapat yang luhur terhadap sistem politik Islam yang baru."

Ketiga konsep ini memiliki dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang menjadi landasan kuat dalam sistem pemerintahan dan demokrasi dalam Islam. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengupas tuntas beberapa ayat yang menjadi sumber dari ketiga konsep dalam sistem pemerintahan tersebut. Maka dari itu, penulis akan menguraikan secara satu per satu rumusan masalah mengenai:

- 1) Bagaimana penjelasan konsep *syura* berkaitan dengan Sistem Pemerintahan dan Demokrasi dalam Q.S. Ali Imran ayat 159 dan Q.S. Asy-Syura ayat 38?
- 2) Bagaimana penjelasan konsep *ummah* berkaitan dengan Sistem Pemerintahan dan Demokrasi dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143 dan Q.S. Hud ayat 118-119?
- 3) Bagaimana penjelasan konsep *bai'at* berkaitan dengan Sistem Pemerintahan dan Demokrasi dalam Q.S. Al-Fath ayat 10 dan 18?

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang dilakukan karena sumber teksnya adalah informasi yang diperoleh dari majalah, laporan penelitian, surat kabar, internet dan sumber lainnya (Marzuki, 2010). Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mencoba memberikan gambaran tentang Konsep Sistem Pemerintahan dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Syura berkaitan dengan Sistem Pemerintahan dan Demokrasi dalam Al-Qur'an

Konsep syura dalam Al-Qur'an disebutkan dalam beberapa surat, diantaranya dalam Q.S. Ali Imran ayat 159 yaitu sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ .

"Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal".

Surat Ali Imran ayat 159 merujuk pada Perang Uhud yang terjadi di Madinah pada tahun ketiga Hijriah (625 M). Sekitar 700 tentara Islam dan 3.000 tentara Quraisy ikut serta dalam Perang Uhud untuk membalas kekalahan mereka pada Perang Badar. Tentara Islam awalnya bersemangat untuk berperang. Sayangnya, banyak masalah di barisan mereka. Pertama, pasukan ketiga, dipimpin oleh komandan pengkhianatnya, Abdullah bin Ubay bin Salul, dijadwalkan pulang sebelum perang dimulai. Kedua, para pemanah yang berada di atas bukit tidak menaati perintah nabi. Sebelum berperang, Rasulullah telah meminta mereka untuk tetap berada di gunung sampai mereka disuruh turun, namun mereka tidak menunggu Rasulullah turun, melainkan mereka turun gunung. Hasilnya, umat Islam yang menang menjadi pihak pertama yang menghadapi gempuran musuh-musuhnya. Setelah dikepung, mereka mundur. Tentara Muslim berada dalam kehancuran. Dalam keadaan seperti ini, sebagian besar tentara meninggalkan Rasulullah dan hanya sedikit sahabat yang melindunginya. Sesuai perang Uhud, Rasulullah berduka atas meninggalnya banyak orang yang syahid, termasuk pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Karena keberaniannya, Hamzah bin Abdul Muthalib dijuluki "Rasulullah". Dalam hidupnya Untuk menghibur dan memuaskan Nabi, surat Ali Imran (ayat 159) diturunkan saat ini. Juga untuk memberitahukan kepada kaum muslimin tentang salah satu nikmat Allah, yaitu Rasulullah yang berakhlak mulia, sabar, baik hati, selalu amanah dan menggunakan metode yang berakal budi.

Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab menjelaskan: "Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW." Nabi harus memiliki tiga sifat: lemah lembut, pemaaf dan meminta maaf kepada orang lain. Allah menyebutkan tiga sifat kemudian memerintahkan nabi untuk membahasnya, contoh interaksi sosial ada pada bagian ini (Shihab, 2003). Begitu pula menurut Wahbah Az-Zuhaili, banyak sekali nilai-nilai komunikasi yang baik dalam Tafsir Al-Munir, antara lain nilai menghargai pihak yang terpanggil untuk berdialog, mengatasi permasalahan yang timbul dengan mempertimbangkan sudut pandang dan gagasan yang berbeda, memadukan langkah dan negosiasi. dll. Pendapat yang baik Setelah dilakukan musyawarah dan pengambilan keputusan, pada ayat ini Allah memerintahkan untuk bertawakal kepadanya karena hanya dialah yang berhak menilai baik dan buruk (Wahbah, 2018).

Dalam Tafsir Al-Azhar juga, Buya Hamka menulis dengan topik khusus, menafsirkan ayat tersebut dengan judul "Syura Sebagai Landasan Masyarakat Islam". Sesungguhnya

“ajaran agama Islam memisahkan urusan dunia dengan urusan dunia.” Urusan dunia, seperti agama, syariah, dan hukum-hukum dasar, adalah milik Tuhan. Saat ini, isu-isu global seperti ekonomi, peternakan, pertanian dan hubungan manusia harus didiskusikan. Dua bidang yang dipertimbangkan dalam negosiasi adalah maslahah (apa yang baik bagi masyarakat) dan mafsadah (apa yang buruk bagi masyarakat) (HAMKA, 2015).

Berkaitan dengan sistem Pemerintahan, konsep syura adalah salah satu prinsip fundamental dalam pemerintahan Islam. Syura berasal dari bahasa Arab yang berarti "berunding" atau "konsultasi". Prinsip syura mengacu pada praktik konsultasi dan partisipasi aktif umat dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan Islam. Menelaah Q.S. Ali Imran ayat 159, maka dapat dijabarkan beberapa petunjuk syura' yang komprehensif dari konsep syura tersebut (Kasman, 2018):

- a. Kata “syura” yang disebutkan dalam bentuk *fi'il amr* atau kata perintah dalam bahasa Arab *وَشَاوِرْهُمْ* menunjukkan bahwa Syura bukan sekedar sunnah, melainkan kewajiban. Karena dalam prinsip fiqh perintah dimaknai sebagai kewajiban yang harus dipenuhi..
- b. Kutipan kata *وَشَاوِرْهُمْ* meski dalam teksnya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun konteksnya membuat perintah ini bisa diterapkan kepada seluruh umat Islam. Karena Nabi Muhammad SAW merupakan pemimpin umum dan teladan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, segala perintah yang diberikan kepadanya berlaku bagi seluruh rakyatnya.
- c. Dalam ayat ini, sebuah perintah bermusyawarah dari Allah kepada Rasul-Nya kepada “mereka” yaitu umat Muslim secara umum. Hal ini dapat dimaknai bahwa tiap-tiap individu dari golongan umat Muslim memiliki hak untuk bermusyawarah demi kemaslahatan bersama.
- d. Substansi perintah bermusyawarah dalam ayat disebutkan dalam kutipan kata *فِي الْأَمْرِ* “dalam urusan itu” yang dapat dimaknai sebagai segala bentuk perkara dan permasalahan dalam berbagai situasi dan kondisi yang dapat dicarikan solusinya melalui musyawarah.
- e. Ayat ini juga memberikan pesan kepada setiap pemimpin bersikap lemah lembut kepada masyarakat yang dipimpinnya melalui kutipan kata *فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ* “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka”. Hal ini sebagai langkah awal bagi seorang pemimpin untuk membangun komunikasi yang baik dalam memulai musyawarah.
- f. Dalam penggalan kata *فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ* “Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka” juga hal ini menyampaikan pesan bahwa semua pemimpin harus peka terhadap perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul selama negosiasi dan menghormati setiap keputusan yang mungkin dihasilkan dari musyawarah.
- g. Penggalan kata *فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ* “Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah” menjelaskan bahwa proses seleksi pemimpin dijelaskan dengan membaginya menjadi dua bagian, yaitu proses seleksi itu sendiri yang saling bertukar pikiran dan ide serta proses penetapan keputusan.

Implementasi konsep syura dalam sistem pemerintahan dapat dilihat dari kualitas pemimpinnya apakah sudah memiliki integritas, keadilan, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk memimpin dengan baik. Pemimpin yang dipilih harus memenuhi syarat-syarat ini untuk menciptakan keadilan terhadap semua aspek kehidupan sosial dalam

pemerintahannya. Keadilan adalah salah satu nilai inti dalam Islam, dan pemimpin yang dipilih melalui syura diharapkan untuk menjalankan pemerintahan dengan adil, tanpa memihak kepada kelompok atau individu tertentu.

Konsep syura juga menekankan pentingnya partisipasi aktif umat dalam urusan pemerintahan dan masalah sosial. Umat dianjurkan untuk memberikan masukan, saran, dan kritik yang konstruktif kepada pemerintah. Pemerintah dalam sistem syura diharapkan untuk mematuhi hukum Islam (syariah) dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah yang dipilih melalui syura harus bertanggung jawab kepada umat, dan umat memiliki hak untuk mengkritik pemerintah jika mereka merasa bahwa kebijakan atau tindakan yang diambil tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau kepentingan umum.

Selain Q.S. Ali Imran ayat 159, konsep syura juga dijelaskan dalam Q.S. Asy-Syura ayat 38 yaitu:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ .

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.

Dalam tafsir Ibnu Katsir tentang Tafsir, ayat di atas menjelaskan: “Para murid Rasulullah tidak memutuskan suatu permasalahan, melainkan terlebih dahulu berunding satu sama lain, sehingga timbul pendapat masing-masing.” Misalnya saja ketika menyangkut perang dan masalah penting lainnya. Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya yaitu Menurut Q.S. Ali Imran ayat 159, ketika Nabi menghadapi peperangan atau masalah penting lainnya, beliau selalu berpesan kepada para sahabatnya agar hati mereka senang dan tenang (Katsir, 1994). Sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Imran ayat 159, “Para murid Rasul Allah tidak memutuskan suatu permasalahan, melainkan saling berbincang terlebih dahulu, sehingga keluar pemikiran masing-masing,” kata Tafsir Ibnu Katsir (Shihab, 2003).

Implementasi konsep syura berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan ayat ini dapat dilihat dari penggalan ayat *وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ* yaitu umat Muslim tidak melaksanakan suatu urusan melainkan berdasarkan hasil musyawarah agar saling mendukung pandangan mengenai isu ini, termasuk isu perang dan kebijakan negara lainnya (Kasman, 2018). Dapat dipahami bahwa selain mengandung pesan ketaatan kepada Allah, ayat ini juga menekankan bahwa urusan umat Muslim adalah dengan berkonsultasi antara sesama mereka. Prinsip ini mencerminkan pentingnya musyawarah dan konsultasi dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan Islam. Kepemimpinan yang bijaksana dan kebijakan yang dibuat melalui konsultasi dengan umat adalah prinsip penting dalam sistem pemerintahan. Ayat ini juga mencatat bahwa mereka memberikan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka kepada yang berhak mendapat bagian (misalnya, zakat dan infaq). Ini menggarisbawahi pentingnya redistribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Jadi, ayat ini secara tidak langsung mengajarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil, konsultatif, dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, termasuk penghargaan terhadap ketaatan kepada Allah, musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi. Ini adalah beberapa dasar dari sistem pemerintahan Islam yang mengutamakan nilai-nilai agama dan kemanusiaan dalam pengaturan urusan masyarakat.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, konsep syura adalah “suatu sistem yang perbuatannya diserahkan kepada masyarakat, termasuk penampakkannya dan cara-caranya diserahkan kepada keputusan masyarakat.” Yusuf berpendapat bahwa konsep syura harus didasarkan pada prinsip konstitusional: “Hukum berubah seiring perubahan waktu dan tempat.” Aturan ini berlaku untuk kasus-kasus hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadits (Husni, 2022). Pada akhirnya, pencarian harus sesuai waktu, tempat, dan cuaca. Hal ini mencakup peraturan dan ketentuan yang berlaku di suatu lokasi. Program Syura merupakan program pelaksanaan demokrasi di negara-negara termasuk Indonesia, dan mencerminkan program Syura melalui empat prinsip yang menjadikan Pancasila sebagai landasan pemerintahan, yaitu, “Dalam memilih wajah, kebijaksanaan membimbing manusia”.

Secara universal, Konsep syura mendorong pemerintahan yang partisipatif. Ini berarti bahwa pengambilan keputusan tidak hanya ditentukan oleh pemimpin atau pemerintah, tetapi juga melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk ulama, pemimpin masyarakat, dan warga negara. Partisipasi ini mencakup memberikan suara dalam pemilihan umum dan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan. Konsep Syura juga mendorong proses pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Keputusan yang dibuat melalui konsultasi harus didasarkan pada keadilan, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah.

Konsep syura dalam pemerintahan juga mencakup perlindungan hak asasi manusia, seperti kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, dan hak atas keadilan. Keputusan yang diambil melalui proses syura diharapkan untuk menghormati hak-hak individu dan kelompok. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, syura dapat berperan dalam pencegahan konflik. Ketika berbagai kelompok merasa bahwa mereka memiliki suara dalam pemerintahan dan bahwa masalah-masalah mereka diperhatikan, peluang terjadinya konflik dapat berkurang. Pemerintahan yang menerapkan konsep syura cenderung memiliki tingkat legitimasi yang lebih tinggi di mata masyarakat. Hal ini karena keputusan yang diambil melalui konsultasi dianggap lebih mewakili kepentingan umat.

Pada akhirnya, konsep syura dapat membantu dalam pemecahan masalah kompleks yang memerlukan berbagai sudut pandang dan pengetahuan yang beragam. Dalam konteks kebijakan publik, masalah seperti ekonomi, pendidikan, atau masalah sosial seringkali kompleks, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat membantu mencapai solusi yang lebih baik.

Konsep Ummah berkaitan dengan Sistem Pemerintahan dan Demokrasi dalam Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an, kata ummah disebutkan dalam beberapa surat, diantaranya Q.S. Al-Baqarah ayat 143 yaitu:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ .

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat

kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyikan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia."

Yang dimaksud dengan wahyu pada ayat ini adalah sebelum dan sesudah Q.S. Al-Baqarah ayat 142 dan 144. "Ibnu Ishaq berkata: "Isma'il bin Khalid meriwayatkan kepadaku dari Abu Ishaq di al-Barra. Beliau bersabda: "Nabi SAW sedang shalat di Baitul Maqdis. Saat itu beliau memandang ke langit, menunggu perintah Allah SWT. Kemudian Allah Tand Allah bersabda: "Jika kami melihat ketika wajahmu terangkat ke langit, maka beliau mengutus nya Kata yang menjelaskan, jika kami melihat, kami menghadapkan Anda menuju Kipilah Yang Maha Tinggi. Arahkan wajahmu ke Masjid Agung. Dimanapun kamu berada, arahkan wajahmu kepada-Nya. Orang-orang yang benar-benar menerima kitab-kitab (Taurat dan Injil) (Yahudi dan Nasrani) mengetahui bahwa Tuhannya berhak pergi ke Masjidil Haram. Karena Tuhan tidak malas dalam bekerja (QS. Al Baqarah ayat 144)."

Kemudian seorang muslim berkata, "Saya ingin mengetahui tentang orang muslim yang meninggal sebelum kita berpindah agama dan bagaimana cara shalat serta melihat jalan menuju Baitul Maqdis." Dan Tuhan mengirimkan firman-Nya. Dan (sekali lagi) Kami jadikan kamu (umat Islam) menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang pilihan. Kami tidak menentukan jalannya, padahal kami tahu siapa yang mengikuti Nabi, siapa yang sesat, dan siapa yang mendapat petunjuk Allah. Ini sangat serius dan Tuhan tidak akan membiarkan Anda kehilangan iman. Allah itu benar, penuh kasih dan baik terhadap manusia. QS. Surat al-Baqarah (ayat 143). Namun pembicaranya berkata: Mengapa mereka meninggalkan keyakinan lama mereka? Itulah sebabnya Tuhan mengirimkan Firman-Nya. Mereka bilang gila "Mengapa umat Islam melupakan kiblat kuno, kiblat (Baitul Maqdis)?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah timur dan barat, dan Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang benar." (QS. Al Baqarah ayat 142)."

Dalam Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab (2003), kata "*wasathan*" disebutkan "Ini adalah perilaku yang benar dari umat Islam yang tidak terlalu ketat dalam agamanya dan tidak mudah untuk dipahami dan diamalkan.". *The Quran does not affirm that Islam is a moderate or wasteland people. This can be explained by the saying that "Islam upholds the faith, not just the sacred symbols of Islam."* Islam tidak hanya menghargai bentuk tetapi juga hakikat agama. Para ulama sepakat bahwa hakikat Islam bukanlah agama yang sederhana, yaitu agama liberal yang membiarkan pikiran bekerja secara mandiri, melainkan agama yang tidak boleh terlalu memaksa untuk mengarah pada tugas penting memahami teks."

Dalam konteks pemerintahan, konsep "*ummatan wasathan*" merupakan konsep penting yang menajknkn pada keadilan dalam semua aspek kehidupan umat Islam dan diharapkan dapat menjalani hidup yang adil dan menghormati hak-hak orang lain atau masyarakat non muslim. Konsep "*ummatan wasathan*" mengajarkan umat Islam untuk menjalani kehidupan yang moderat, menjauhi ekstremisme, dan menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, sosial, dan ekonomi. Umat Islam diharapkan untuk menjadi saksi atas tindakan-tindakan manusia yang adil. Umat Muslim harus menjadi teladan dalam prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan. Konsep ini juga mengindikasikan bahwa umat Islam dipilih oleh Allah untuk menjalani kehidupan yang adil dan moderat, dan untuk menjadi panutan bagi orang lain (Ayubi, 2012).

Dapat disimpulkan bahwa konsep "*ummatan wasathan*" menggarisbawahi pentingnya menjalani kehidupan yang seimbang, adil, dan tidak ekstrem dalam berbagai aspek kehidupan. Ini juga memiliki implikasi dalam pemerintahan Islam, di mana pemerintah dan pemimpin umat Islam diharapkan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan moderasi dijunjung tinggi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Ayat yang berkaitan dengan konsep ummah terdapat juga dalam Q.S. Hud ayat 118-119 yaitu:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨)
إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَفَهُمُ الْكَلِمَةُ رَبُّكَ لَا يَمُنُّنَ بِهِمْ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١٩)

"Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu. Namun, mereka senantiasa berselisih (dalam urusan agama), kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Menurut (kehendak-Nya) itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) Tuhanmu telah tetap, "Aku pasti akan memenuhi (neraka) Jahanam (dengan pendurhaka) dari kalangan jin dan manusia semuanya."

Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa "Allah Swt. Dia berhak menjadikan seluruh umat manusia menjadi satu bangsa berdasarkan iman atau kekafiran, kecuali orang-orang yang dicintai dari kalangan murid-murid Rasul, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan dengan mereka, mereka adalah penganut tarekat agama yang diutus oleh para rasul Allah, dan demikianlah yang tetap terjadi hingga Nabi, sebagai rasul dan nabi terakhir, mengikutinya, memperbaiki amalannya, membantunya mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, sekelompok orang ini masih hidup dan beruntung mendapatkannya." (Katsir, 1994).

Menurut Komarudin Hidayat (2000), keberagaman dan keberagaman merupakan hukum alam dan kehendak Allah. Perbedaan dan perbedaan bisa saling bersinergi dan memperjuangkan kebaikan. Namun, seringkali orang melihat perbedaan tersebut dengan pandangan negatif. Namun ingatlah bahwa hidup bersama orang yang berbeda agama, masyarakat, budaya, politik berarti hidup bersama orang yang berbeda. Dalam menata kehidupan untuk menuju masyarakat ideal, pluralitas adalah hal yang wajib. Adapun dalam konteks sistem pemerintahan, ayat ini menjadi dapat diinterpretasikan sebagai sebuah peringatan bagi pemimpin untuk memilih jalan yang benar dan untuk menjauhi perselisihan dan ketidaksetujuan yang tidak diberkati oleh Allah. Keseluruhan pesan dalam ayat-ayat ini adalah untuk menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah, menerima rahmat-Nya, dan menjauhi perpecahan dan kesesatan karena pada dasarnya manusia sejak dahulu adalah umat yang satu. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, konsep "*ummatan wahidah*" tercermin dalam sila ketiga Pancasila, yaitu "*Persatuan Indonesia*".

Dapat dipahami bahwa konsep "*ummah*" (komunitas atau masyarakat) dalam memiliki dampak besar dalam kehidupan sosial umat Islam serta dapat diimplementasikan secara universal melalui nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Ini merujuk kepada komunitas Muslim secara keseluruhan dan membawa sejumlah implikasi dalam kehidupan sosial. Konsep *ummah* menekankan persatuan dan solidaritas antara umat manusia. Ini berarti bahwa masyarakat Indonesia diharapkan untuk saling mendukung dan bekerja sama ketika diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih besar, seperti memberikan dukungan sosial kepada masyarakat miskin, anak yatim dan kelompok kurang mampu.

Konsep Baiat berkaitan dengan Sistem Pemerintahan dan Demokrasi dalam Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an, kata bai'at ditemukan dalam beberapa Surat, diantaranya dalam Q.S. Al-Fath ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ فُوقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا .

“Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan⁶⁹² Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji (setia itu), maka sesungguhnya (akibat buruk dari) pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan menganugerahinya pahala yang besar.”

Menurut Quraish Shihab dari Tafsir Al-Mishbah, orang-orang yang bersumpah setia kepada Rasulullah tetap bersumpah kepada Allah karena mereka mempunyai kekuatan-Nya dan selalu mengalahkan mereka. Jika seseorang berjanji dan mengingkarinya, ia akan menghadapi konsekuensinya. Sebaliknya, mereka yang menepati janjinya kepada Allah akan mendapat pahala (Shihab, 2003).

Mengenai penjelasan Ibnu Katsir mengenai ayat ini, beliau menjelaskan bahwa “awal mula sumpah setia adalah perintah Allah kepada Rasulullah untuk bersumpah setia kepada para sahabatnya.” Dan janji tersebut adalah Bai'atur Ridhwan yang dibuat di bawah pohon Samurah di Hudaibiyah. Ada yang mengatakan bahwa jumlah sahabat setia Nabi SAW saat itu adalah 1300, 1400, 1500. Sekali lagi, bagian tengah adalah yang paling akurat. Menurut Ibnu Katsir dan “baiand”, sifat Rasulullah yang kuat terhadap para sahabatnya merupakan wujud kesetiaannya kepada Allah dan kesediaannya untuk mendengarkan beliau dan Rasulnya dalam ketaatan terhadap segala perintahnya dan meninggalkan hukum-hukumnya.” Dengan kata lain, Buy&At sedang dalam proses mendengarkan Tuhan dan Rasul-Nya untuk memenuhi amanat-amanat-Nya di dunia ini (Ismail dkk, 2019).

Dalam konteks sistem pemerintahan Islam, konsep Bai'at memiliki beberapa implikasi penting:

- a. Kesetiaan dan Kepemimpinan: Bai'at adalah tindakan kesetiaan dan pengakuan terhadap kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam. Ini menunjukkan pentingnya pengakuan dan kesetiaan terhadap pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam.
- b. Ketulusan Hati: Ayat ini menyatakan bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati para sahabat yang bersumpah setia. Ini menggarisbawahi pentingnya ketulusan hati dalam pengakuan terhadap kepemimpinan dan komitmen kepada prinsip-prinsip Islam dalam sistem pemerintahan.
- c. Ketenangan dan Kemenangan: Setelah Bai'at Ridwan, Allah menurunkan ketenangan kepada para sahabat dan memberi mereka kemenangan yang dekat. Ini mencerminkan bahwa ketika umat Islam bersatu dan bersumpah setia untuk mendukung pemimpin mereka, mereka akan mendapatkan ketenangan dan kemenangan dalam perjuangan mereka.
- d. Prinsip Demokrasi: Konsep Bai'at juga mencerminkan prinsip demokrasi dalam Islam, di mana pemimpin dipilih atau diakui oleh umat dan harus memiliki dukungan dan

kesetiaan dari umat. Bai'at adalah contoh awal dari partisipasi umat dalam pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan Islam.

Konsep Baiat juga tersirat dalam Q.S. Al-Fath ayat 18 yaitu:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

"Sungguh, Allah benar-benar telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad) di bawah sebuah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia menganugerahkan ketenangan kepada mereka dan memberi balasan berupa kemenangan yang dekat".

Namun menurut Ibnu Katsir (1994), ayat ini mengacu pada "ridha Allah terhadap orang-orang mukmin yang berikrar setia kepada Rasulullah". di bawah pohon." Dulu disebutkan jumlahnya 1.400, dan pohon yang dimaksud adalah pohon Samura di Hudaibiya. Menurut Imam Bukhari, kami mendengar dari Ubaidillah di Israel tentang Tariq Mahmud. Suatu ketika Abdur Rahman mendengar bahwa dia telah berangkat haji, dan setelah berbicara dengan orang-orang yang sedang shalat, dia bertanya, "Masjid apa ini?" Dan mereka menjawab dan berkata: Ini adalah pohon Tuhan, damai dan berkah besertanya. Di bawahnya dia memimpin aliansi Ridwan. Yang paling penting, ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengetahui kesetiaan, kesetiaan dan ketaatan orang-orang beriman dan akan memberi mereka kemenangan. Ini adalah tanda kemurahan Tuhan kepada mereka, dan tanda bahwa mereka akan menerima kemuliaan, pertolongan dan kekuasaan yang besar di dunia dan akhirat..

Meskipun ayat ini tidak secara langsung mengatur masalah sistem pemerintahan dalam rincian yang spesifik, ia menggarisbawahi prinsip-prinsip kesetiaan, pengakuan pemimpin, dan ketulusan hati yang merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan Islam. Pemerintahan dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, partisipasi umat, dan pemenuhan hak-hak individu, sementara juga menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral. Ayat ini menyoroti pentingnya kesetiaan kepada pemimpin atau pemimpin umat dalam Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam, pemimpin yang sah dipilih atau diakui oleh umat, dan umat diharapkan untuk mendukungnya dengan setia. Ayat ini juga menekankan bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati orang-orang yang bersumpah setia. Ini menggarisbawahi pentingnya ketulusan hati dan kesetiaan yang tulus kepada pemimpin dan prinsip-prinsip Islam. Ketika umat Islam bersatu dalam kesetiaan kepada pemimpin mereka dan prinsip-prinsip Islam, Allah menurunkan ketenangan kepada mereka dan memberikan kemenangan yang dekat. Ini mencerminkan bahwa keberhasilan dalam pemerintahan Islam tergantung pada persatuan, ketulusan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama.

Dapat dipahami bahwa secara universal, konsep bai'at dalam konteks berbangsa dan bernegara merujuk pada tindakan kesetiaan, pengakuan, dan komitmen yang diambil oleh warga negara terhadap pemerintahan atau pemimpin mereka. Konsep ini mungkin memiliki variasi dalam berbagai negara dan budaya, tergantung pada sistem politik dan nilai-nilai yang berlaku. Bai'at juga mencerminkan komitmen individu atau kelompok terhadap prinsip-prinsip negara atau konstitusi yang berlaku. Ini mencakup komitmen untuk mematuhi hukum, hak-hak asasi manusia, dan nilai-nilai sosial yang diakui. Bai'at menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah atau pemimpin

berkomitmen untuk melindungi dan melayani warga negara, sementara warga negara berkomitmen untuk mendukung pemerintah dan mematuhi hukum.

Penting untuk diingat bahwa konsep bai'at dapat berbeda dalam konteks negara yang berbeda. Beberapa negara mungkin memiliki tradisi bai'at yang kuat, sementara yang lain mungkin menggantikan konsep ini dengan mekanisme lain untuk mengukuhkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Selain itu, nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip konstitusional juga memengaruhi bagaimana konsep bai'at diterapkan dalam praktik politik modern.

Penutup

Secara universal, Konsep syura mendorong pemerintahan yang partisipatif. Ini berarti bahwa pengambilan keputusan tidak hanya ditentukan oleh pemimpin atau pemerintah, tetapi juga melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk ulama, pemimpin masyarakat, dan warga negara. Partisipasi ini mencakup memberikan suara dalam pemilihan umum dan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan. Konsep Syura juga mendorong proses pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Keputusan yang dibuat melalui konsultasi harus didasarkan pada keadilan, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah.

Konsep "*ummah*" (komunitas atau masyarakat) dalam memiliki dampak besar dalam kehidupan sosial umat Islam serta dapat diimplementasikan secara universal melalui nilai-nilai yang ada pada sila ketiga Pancasila. Ini merujuk kepada komunitas Muslim secara keseluruhan dan membawa sejumlah implikasi dalam kehidupan sosial. Konsep *ummah* menekankan persatuan dan solidaritas antara umat manusia. Ini berarti bahwa masyarakat Indonesia diharapkan untuk saling mendukung, termasuk memberikan dukungan sosial kepada masyarakat miskin, anak yatim dan dhuafa, saling membantu pada saat dibutuhkan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih besar.

Adapun secara universal, konsep bai'at dalam konteks berbangsa dan bernegara merujuk pada tindakan kesetiaan, pengakuan, dan komitmen yang diambil oleh warga negara terhadap pemerintahan atau pemimpin mereka. Konsep ini mungkin memiliki variasi dalam berbagai negara dan budaya, tergantung pada sistem politik dan nilai-nilai yang berlaku. Bai'at juga mencerminkan komitmen individu atau kelompok terhadap prinsip-prinsip negara atau konstitusi yang berlaku. Ini mencakup komitmen untuk mematuhi hukum, hak-hak asasi manusia, dan nilai-nilai sosial yang diakui. Bai'at menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah atau pemimpin berkomitmen untuk melindungi dan melayani warga negara, sementara warga negara berkomitmen untuk mendukung pemerintah dan mematuhi hukum.

Pancasila dan Islam tidak bertentangan satu sama lain, justru nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat mencerminkan nilai-nilai Islam. Namun, untuk mendorong implementasi Pancasila secara kaffah sebagaimana konsep syura, ummah, dan baiat harus ada *political will* dari Pemerintah demi tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Islam dapat menghasilkan sistem yang lebih adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Nilai-nilai Islam dapat membantu menciptakan keseimbangan yang tepat antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat. Islam menawarkan kerangka kerja yang seimbang antara hak-hak individu dan tanggung jawab sosial. Sistem pemerintahan dan demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam berargumen bahwa konsep-konsep demokratis, seperti keadilan, transparansi, dan kebebasan individu, bukan sistem khilafah yang interpretasinya melenceng jauh dari nilai-nilai Islam yang berlandaskan radikalisme. Mayoritas penganut Islam menjalankan ajaran agama mereka sebagai suatu bentuk ibadah

dan kehidupan yang damai, sedangkan radikalisme yang melibatkan kekerasan lebih sering dikaitkan dengan kelompok-kelompok minoritas yang menganut ideologi ekstrem dan tidak mewakili mayoritas umat Islam.

Referensi

- Adan, Husni A. Jalil; Hikmawati Meuraxa; Hasanuddin Yusuf. "Konsep Syura Menurut Yusuf Al-Qaradawi Dan Relevansinya Dengan Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia." *As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 96-114.
- Ayubi, Sholahuddin Al. "Ummah Dan Masyarakat Madani Dalam Al-Qur'an." *Al-Fath* 6, no. 2 (2012): 232-250.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj)*. Cetakan 3. Gema Insani, 2018.
- Bakry, Kasman. "Konsep Syura Dalam Al-Qur'an." *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 1 (2018): 70-83.
- HAMKA. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hidayat, Komaruddin. *Kejernihan Di Tengah Pertikaian, Dalam Nurcholish Madjid et. Al. Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern Respon Dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Mneuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Mediacita, 2000.
- Ismail, Samsul Bahri; Zainuddin; Muhammad Husni bin. "Bai'at Dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Ibnu Katsir." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2019): 182-194.
- Kalijaga, Tim Pokja UIN Sunan. *Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta, 2005.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Beirut: Daar Fikr, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-6. Jakarta: Kencana, 2010.
- Pena, Tim Prima. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gitamedia Press, 2006.
- Rangkuti, Afifa. "Demokrasi Dalam Pandangan Islam Dan Barat." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 2 (2018): 40-59.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qru'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Shihab, Quraisy. *Wawasan Al Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Syamsuddin, Din. *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos, 2002.